BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam pergelaran proses demokratisasi daerah, baru mempunyai kesempatan untuk dapat ikut serta dalam menentukan kepala pemerintahan di daerah pada tahun 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan 16 tahun lamanya sejak pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada bulan Juni tahun 2005, Pilkada secara langsung telah memberikan sebuah keberhasilan pada pergelaran putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden yang bergulir pada tanggal 5 Juli 2004.[1]

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah merupakan penanda gelombang awal demokratisasi. Perkembangan demokratisasi di daerah juga menyebabkan perubahan pada Undang-Undang, yang mana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan dalam pengaturan demokratisasi di daerah menjadikan landasan perubahan terhadap perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang awalnya hanya dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah menjadi pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat.[2]

---

[1] Ridho Imawan Hanafi. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai politik. *Jurnal penelitian Politik LIPI*. 11(2). Hlm: 1-16.
[2] Lili Romli. 2018. Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Liberal. *Jurnal penelitian Politik LIPI*. 15(2). Hlm: 143-160.

Pilkada langsung secara serentak sudah diberlakukan sejak tahun 2015, Pilkada langsung ini diselenggarakan secara serentak guna untuk mengurangi biaya baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi, yang disebabkan oleh pergelaran Pilkada. Di samping upaya mengurangi terjadinya permasalahan sosial, politik, dan ekonomi, Pilkada secara serentak diharapkan berjalan dengan efektif dari segi waktu maupun biaya. Selain bertujuan untuk mengambil kembali hak-hak politik rakyat dalam upaya memperbaiki kestabilan demokrasi setelah pergantian rezim orde baru ke reformasi, Pilkada langsung juga dimanfaatkan oleh partai politik sebagai wadah kompetisi untuk mengambil alih kursi kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu upaya partai politik untuk dapat mencapai tujuannya yaitu dengan cara menentukan kandidat yang ikut berkompetisi sebagai salah satu perwakilan dari partai dalam pergelaran Pilkada.

Menurut pandangan dari Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terstruktur dengan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah kekuasaan politik melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka.[3] Ramlan Surbakti juga menyatakan partai politik sekumpulan orang yang terorganisir dengan rapi dan dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun.[4]

[3] Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 403.
[4] Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 148.

Didalam buku yang berjudul *Modern Political Parties* karya Neumann juga mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menggapai kekuasaan pemerintahan serta mengambil alih dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.[5]

Dari ketiga pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Miriam Budiardjo, Ramlan Subakti, dan Neumann terdapat kesamaan yaitu partai politik merupakan suatu sekelompok orang yang telah terstruktur dan tersusun rapi yang memiliki tujuan tertentu. Hal ini merupakan betapa pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk membentuk suatu organisasi dalam menyalurkan aspirasinya. Dari beberapa uraian diatas dapat didefinisikan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang berjalan dibidang pemerintahan atau juga wadah untuk menampung orang-orang yang memiliki ideologi tertentu dan kesamaan tujuan dengan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa serta memelihara keutuhan negara.

Tercapai tidaknya suatu sistem politik tergantung pada kualitas kandidasi. Kandidasi adalah bahasa lain dari rekrutmen politik. Ramlan surbakti menjelaskan kandidasi sebagai seleksi pemilihan atau bisa disebut seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan sejumlah peranan dalam sistem partai politik pada umumnya dan pemerintahan pada

[5] Sigmund Neumann. 1963. *Modern Political Parties.* Dalam *Comparative Politics*: *A Reader. Edited* oleh Harry Eckstein *and* David E. Apter. London: *The Free Press of Glencoe*. Hlm 352.

khususnya, dengan memberikan hak khusus kepada orang-orang berbakat yang cukup menonjol. Dikarenakan fungsi seperti ini sangat berperan penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa adanya elit yang mampu menjalankan perannya maka kelangsungan hidup sistem politik sedikit terancam. Namun kandidasi pada dasarnya adalah penyeleksian para individu yang memiliki bakat untuk memimpin dan menduduki jabatan politik atau jabatan internal pemerintahan dan proses kandidasi ini juga berfungsi sebagai pemilihan untuk orang-orang yang ditunjuk ataupun diangkat dalam mengisi peranan sistem sosial.

Kandidasi berkaitan erat dengan penentuan calon partai politik yang mana terdapat beberapa proses penentuan calon melalui partai politik. Menurut Czudnowski adanya dua pola yang dipakai dalam proses penentuan calon melalui partai politik yaitu pola terbuka dan pola tertutup. Yang pertama adanya pola terbuka, pola terbuka ini mengharuskan adanya persyaratan dan prosedur untuk menampilkan sosok tokoh untuk diperkenalkan secara luas. Dengan begitu partai politik bisa digunakan sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan penghargaan dan dukungan dari masyarakat.[6]

Dengan sistem yang berjalan seperti ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan menilai secara langsung kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk berkompetisi dalam pemilihan. Adanya beberapa manfaat dari pola terbuka ini yaitu mekanisme penentuan

[6] Mushab Robbani. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 12.

calon demokratis, tingkat persaingan politik sangat tinggi dan masyarakat juga mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, dapat melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Pola kedua yaitu pola tertutup, mengandalkan persyaratan dan melakukan prosedur secara tertutup tanpa sepengetahuan umum. Dengan demikian partai politik hanya berperan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai politik itu sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat juga menilai kemampuan kandidat yang dicalonkan oleh partai dan pada akhirnya menghasilkan pilihan-pilihan politik yang sangat terbatas bagi masyarakat dan cenderung terlihat sangat tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbaharui legitimasi sistem politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya pengamat luar lapangan saja.[7]

Melihat dari teori yang dikemukakan oleh Richard E. Matland yang menjelaskan ada tiga tahapan dalam proses kandidasi untuk menentukan siapa calon kandidat yang layak untuk menduduki jabatan sosial-politik maupun jabatan dalam pemerintahan. Tahapan pertama yaitu seleksi diri *(Selecting Yourself)*, seseorang yang memutuskan untuk mencalonkan diri untuk jabatan terpilih. Keputusannya untuk maju adalah dipengaruhi oleh ambisi, motivasi, dan kesempatan untuk berdiri. Pada tahapan kedua yaitu seleksi partai *(Being*

[7] *Ibid.*

Selected by the Party), dipilih oleh partai. Memilih kandidat adalah salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai politik. pertimbangan penting bagi suatu partai adalah menghadirkan seseorang kandidat yang diyakini partai memaksimalkan suaranya. Tahapan yang terakhir yaitu basis dukungan *(Getting Elected)*, para orang-orang atau kelompok yang melakukan dukungan dan menjatuhkan pilihan terhadap calon kandidat juga termasuk penting dalam pertimbangan tahap kandidasi.[8]

Seleksi kandidat kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan kepala daerah serentak saat ini. Pengambilan keputusan di internal partai politik sangat menentukan siapa kandidat yang diusung oleh partai politik. Pemilihan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada seringkali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para calon pemilih yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilaksanakan oleh internal partai. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani mengatakan saat Pilkada berlangsung, sikap partai menjadi pragmatis, secara realistis berhitung antara menang atau kalah. Pendekatannya selalu pada pasangan calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan memungkinkan untuk menang. Fungsi internal masing-masing partai politik ditentukan oleh eksternal kekuatan seperti sistem pemilihan domestik, budaya politik, dan peraturan hukum.

[8] Jullie Ballington and Azza Karam. 2005. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. *Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance*. Hlm. 93.

Oligarki pada partai politik dalam mengusung dan menentukan pasangan calon, sebagian besar tidak adanya mekanisme seleksi calon yang dilakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Calon yang diusung dalam Pilkada hanya diputuskan oleh beberapa para elit partai. Pemilihan terhadap pasangan calon tidak dilihat dari dasar integritas, kapasitas, maupun kapabilitas, tetapi juga ditentukan oleh mempunyai finansial dan menyediakan mahar. Tidak heran partai politik sibuk mencari sosok figur calon yang memiliki kepopuleran dan memiliki hak keistimewaan sendiri, dari pada sosok figur pasangan calon memiliki program dan visi misi yang jelas untuk kemajuan daerah.[9]

Salah satu pola kandidasi anggota partai yang unik juga dilakukan oleh partai NasDem dalam prosesnya. Awal mula Partai NasDem berdiri pada tanggal 26 Juli 2011 di hotel Mercure Ancol, Jakarta. Pertama kali terbentuk Partai NasDem adalah bukan sebuah Partai melainkan sebuah Ormas (Organisasi Masyarakat) dengan nama Ormas Gerakan Nasional Demokrat yang diketuai oleh Surya Paloh. Pada Kongres Pertama Partai NasDem yang digelar pada 25 hingga 26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018.[10]

---

[9] Prayudi, dkk. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak.* Jakarta: Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hlm. 1-3.

[10] Lihat Nasdem.id, Sejarah Partai Nasdem, (https://nasdem.id/sejarah-partai-nasdem/) di akses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 14:50 WIB.

Ditengah praktek politik transaksi, politik citra, politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam panggung kehidupan demokrasi, di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap partai, partai NasDem lahir sebagai partai baru untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus terjadi.[11] Dengan mengangkat paradigma baru dalam pesta demokrasi, partai NasDem menjadi partai pertama yang berani mengusung politik tanpa mahar.[12] Politik tanpa mahar adalah politik yang memberikan warna baru di Indonesia dengan tujuan mengubah pola pikir yang selama ini dalam pelaksanaan demokrasi harus menggunakan sesuatu dalam bentuk materi yang dianggap tidak mencerdaskan.

Partai NasDem memiliki misi yaitu tidak ingin para calon yang ingin menjadi bagian dalam menduduki mandat yaitu menjadi wakil rakyat dibebankan dengan nominal uang yang nanti akan berdampak negatif bagi kinerja wakil rakyat itu sendiri. Melakukan politik dengan mahar berdampak ketika calon pemimpin menggunakan politik transaksional disaat masa pemilihan nantinya akan muncul keinginan untuk mendapatkan kembali apa yang sudah dikeluarkan atau dihabiskan selama masa pemilihan. Politik dengan mahar mendorong para kader untuk menginginkan feedback terhadap apa yang sudah mereka berikan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBD hal ini dibuktikan dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat dengan hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[11] Daniel Pandowo Idohape. 2019. *Strategi Partai Politik Partai NasDem Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018*. Doctoral dissertation Universitas Bakrie. Hlm 1-29.

[12] Chelsy Yesicha. 2018. Strategi Komunikasi "Politik Tanpa Mahar" Kaderisasi Partai Nasional Demokrat Wilayah Riau. Communiverse: *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1). Hlm: 7-16.

Dengan konsep yang diterapkan oleh Partai NasDem ini menjadikan hal unik sekaligus pembeda partai NasDem dengan partai lainnya, Partai NasDem bisa dikatakan satu-satunya partai yang menganut politik tanpa mahar dikarenakan tujuan awal Partai NasDem yang tidak ingin membebankan para individu-individu yang berkeinginan untuk ikut dalam pergelaran demokrasi terhalang dengan adanya mahar untuk partai. Partai NasDem menerapkan konsep tanpa mahar ini berkeinginan melahirkan pemimpin berkualitas, integritas, kapabilitas, dan elektabilitas yang tinggi.

Penelitian tentang kandidasi juga pernah dilakukan oleh Stevany Debora pada tahun 2014.[13] Penelitian dengan judul "Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013". Pada Pilkada Kota Malang tahun 2013 ini, menyebabkan munculnya konflik yang melibatkan elit di internal partai. Kasus yang dijadikan fokus kajian pada penelitian ini adalah proses kandidasi dalam Pilkada Kota Malang 2013. Bagaimana pelembagaan partai PDI Perjuangan mengatur proses kandidasi serta menyelesaikan konflik yang terjadi pada partai PDI Perjuangan ini. Dari penelitian ini menghasilkan sebagaimana bahwa PDI Perjuangan dalam proses kandidasi mengacu pada mekanisme yang disepakati bersama yaitu AD/ART partai serta aturan yang ditetapkan oleh pusat. Konflik yang muncul pada partai juga dikarenakan

[13] Steafany Debora. 2013. Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda UNAIR*. Hlm 1-11.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ketidakpuasan salah satu pihak terhadap kandidat yang direkomendasikan oleh pusat.

Terdapat kebaharuan pada penelitian ini, kebaharuan ini menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kandidasi, adanya salah satu penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang kandidasi yang dilakukan oleh Stevany Debora menemukan adanya konflik yang terjadi di internal partai PDIP dikarenakan adanya salah satu pihak internal PDIP yang tidak puas dengan calon kandidat usungan dari PDIP tersebut. Sedangkan pada penelitian ini peneliti juga berfokus kepada bagaimana proses kandidasi yang dilakukan oleh partai NasDem, mekanisme pencalonan kandidat oleh partai NasDem terbilang unik dikarenakan konsep yang diterapkan Partai NasDem memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin berkesempatan untuk ikut andil dalam pergelaran demokrasi, partai NasDem tidak menetapkan mahar terhadap kandidat yang bakal diusung walaupun kandidat tersebut dari kader ataupun tidak berasal dari kader itu sendiri, kembali kepada tujuan awal Partai NasDem yang melihat dari background dan visi misi kandidat yang bakal diusungnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.2 Rumusan Masalah

Hegemoni Pilkada langsung tidak hanya menyoal aktor yang berkompetisi saja, namun disisi lain peranan partai politik juga dianggap vital sebagai mobilisator mesin politik kandidat calon kepala daerah. Melalui rekrutmen partai politik, partai dapat menentukan siapa calon kandidat yang benar-benar masuk kedalam kriteria pencalonan. Fungsi rekrutmen politik ini

menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Apabila partai politik gagal dalam melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik.[14]

Partai NasDem memiliki dua pola dalam perekrutan, pola pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai. Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka dengan tidak memandang status, kedudukan, kekayaan ataupun jabatan. Penerimaan kader ini diawali dengan pengisian surat pernyataan anggota Partai NasDem disertai fotokopi data diri seperti KTP, SIM atau KTM bagi mahasiswa. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC, DPD, atau DPW Partai NasDem. Setelah berkas diterima, pihak partai kemudian akan mengirimkan data ke DPP. Pengiriman data yang dilakukan secara online ini bertujuan untuk mendapatkan KTA partai dari DPP. Untuk menarik minat anggota partai, Partai NasDem memberikan asuransi sebesar satu juta yang berlaku bila telah menjadi anggota partai.

Pola yang kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik di internal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak Partai NasDem. Contohnya apabila akan ditentukan calon pimpinan DPC, calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Pemilihan

[14] Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia.* Yogyakarta:Institute For Democracy and Wealfarism. Hlm. 89.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dilakukan pada saat rapat kerja DPC, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPC.[15]

Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan bahwa, Partai NasDem mengusung dan mendukung 267 kandidat yang terdiri dari calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota dari 270 daerah pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Johnny mengatakan, survei menjadi basis bagi Partai NasDem dalam mengambil keputusan untuk memajukan pasangan calon. Melalui survei, partai dapat melihat penilaian masyarakat tentang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah atau daerah yang bersangkutan.

> "Penentuan calon yang diusung dan didukung oleh Partai NasDem dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan Partai NasDem yaitu politik tanpa mahar dan penggunaan metode ilmiah dalam hal ini survei dan asistensi atau advisory untuk mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat," kata Johnny dalam konferensi pers.

Kemudian, tahapan kampanye akan digelar selama 71 hari bermulai dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Sementara itu hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.[16] Termasuk Kota Bukittinggi merupakan juga salah satu kota partisipan pelaksana Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung serentak pada tahun 2020 di Sumatera Barat.

---

[15] Dwi Karunia Rizki. 2017. Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*. 6 (1): Hlm. 1-15.

[16] Lihat Irfan Kamil, NasDem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020, (https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/21355321/nasdem-usung-267-kandidat-di-pilkada-2020), di akses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09:02 WIB.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah menetapkan tiga pasangan calon sebagai peserta Pilkada serentak 2020. Berikut ketiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi:

Tabel 1. 1

Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi

No	Kandidat	Koalisi
1	**Irwandi-David Chalik**	**Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan PKB.**
2	Erman Safar-Marfendi	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Golkar.
3	Ramlan Nurmatias-Syahrizal	Perseorangan atau Independen.

Sumber: Dikutip melalui https://www.tagar.id/profil-lengkap-3-calon-wali kota-bukittinggi-di-pilkada-2020.

Penetapan pasangan calon itu, dilaksanakan dalam Rapat Pleno penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dalam Pilkada serentak 2020, di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Ketua KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura menjelaskan, KPU telah tetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan kepala daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.[17] Penetapan dilaksanakan sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Salah satu partai politik yang berpartisipasi dalam Pilkada adalah koalisi dari Partai NasDem, yang mana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menetapkan sembilan pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat 2020. Penetapan disertai dengan penyerahan

[17] Lihat Hariankoranpadang.com, KPU Bukittinggi Tetapkan Tiga Paslon Pada Pilkada 2020, (https://hariankoranpadang.com/uncategorized/kpu-bukittinggi-tetapkan-tiga-paslon-pada-pilkada-2020/), di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 22:15 WIB.

surat keputusan ke masing-masing pasangan calon. Berikut 9 Pasang Calon yang diusung Partai NasDem di Pilkada Sumbar 2020 :

Tabel 1. 2
Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi

No	Daerah	Kandidat	Koalisi
1	Kabupaten Padang Pariaman	Suhatri Bur-Rahman	Partai NasDem, PAN dan PDIP.
2	Kabupaten Agam	Trinda Farhan-M Kasni	Partai NasDem dan PKS
3	**Kota Bukittinggi**	**Irwandi-David Chalik**	**Partai NasDem, PAN dan PKB**
4	Kabupaten Pasaman Barat	Yulianto-Syafrial	Partai NasDem dan Partai Demokrat
5	Kabupaten Sijunjung	Benny Dwipa Yuswir-Iradatillah	Partai NasDem, PPP, Partai Golkar, PBB dan Partai Perindo
6	Kabupaten Solok	Nofi Candra-Yulfadri Nurdin	Partai NasDem dan PPP
7	Kota Solok	Zul Efian-Ramadhani Kirana Putra	Partai NasDem, PAN dan PKS.
8	Kabupaten Solok Selatan	Abdurrahman-Rosman Efendi	Partai NasDem, Partai Gerindra dan PKS.
9	Kabupaten Pesisir Selatan	Hendrajoni-Hamdanus	Partai NasDem, PKS dan PDIP

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber website.

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwasanya pasangan Irwandi-David Chalik ini diusung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai NasDem. PAN memiliki tiga kursi dan Partai NasDem dua kursi sehingga sudah bisa mendaftar ke KPU Bukittinggi. Koalisi PAN dan Partai NasDem mengusung calon karena syarat lima kursi di DPRD Bukittinggi terpenuhi. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumbar, Indra Dt Rajolelo yang dihubungi terpisah membenarkan PAN mengusung pasangan Irwandi-

David Chalik dengan berkoalisi bersama Partai NasDem.[18] Irwandi merupakan sosok birokrat yang berpengalaman di pemerintahan.[19] Sementara David Chalik merupakan selebriti nasional yang sangat digandrungi masyarakat, terutama kaum milenial. Selain itu, David Chalik juga seorang yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.[20]

Dalam kontestasi Pilkada Sumbar 2020, seluruh pasangan calon dari Partai NasDem berkoalisi dengan beberapa partai lainnya. Dalam hal ini secara jelas Hendrajoni menegaskan bahwa semua kandidat yang diusung Partai NasDem ditetapkan tanpa mahar. Para calon hanya diminta untuk berjuang melakukan perubahan untuk wilayah masing-masing yang menjadi komitmen partai.[21] Dari fenomena yang peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai bagaimana kandidasi Partai NasDem untuk mengusung calon kandidat dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Bukittinggi. Peneliti berasumsi bahwa dalam pengusungan calon kandidat dari Partai NasDem tidak diterapkannya mahar namun para calon hanya diminta untuk memberikan hasil yang optimal dalam persaingan pada Pilkada 2020 di Kota Bukittinggi.

---

[18] Lihat Perdana Putra, Diusung PAN-NasDem, Artis David Chalik Maju di Pilkada Bukittinggi, (https://regional.kompas.com/read/2020/08/25/07130451/diusung-pan-nasdem-artis-david-chalik-maju-di-pilkada-bukittinggi), di akses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 22:10 WIB.

[19] *Ibid.*

[20] Lihat Beritasatu.com, David Chalik: Tahun Ini Tahun Tepat Untuk Nyaleg, (https://www.beritasatu.com/archive/111785/david-chalik-tahun-ini-tahun-tepat-untuk-nyaleg), di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 18:18 WIB.

[21] Jurnalsumbar.com, Ditandai Penyerahan B.1-KWK Parpol, Partai NasDem Usung Sembilan Pasang Cakada se-Sumbar Tanpa Mahar, (https://jurnalsumbar.com/2020/08/ditandai-penyerahan-b-1-kwk-parpol-partai-nasdem-usung-sembilan-pasang-cakada-se-sumbar-tanpa-mahar/), di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 18:22 WIB.

Untuk menganalisis proses kandidasi calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh Partai NasDem, peneliti akan menggunakan teori kandidasi politik yang dikemukakan oleh Richard E. Matland, untuk melihat bagaimana proses kandidasi Partai NasDem terhadap penetapan calon kandidat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Richard E. Matland didalam teorinya, Matland menjelaskan adanya tiga pola tahapan untuk menentukan kandidat yang bakal diusung untuk menduduki jabatan sosial-politik maupun di bidang pemerintahan.

Melihat dari teori yang dikemukakan oleh Richard E. Matland yang menjelaskan ada tiga tahapan dalam proses kandidasi untuk menentukan siapa calon kandidat yang layak untuk menduduki jabatan sosial-politik maupun jabatan dalam pemerintahan. Tahapan pertama yaitu seleksi diri *(Selecting Yourself)*, seseorang yang memutuskan untuk mencalonkan diri untuk jabatan terpilih. Keputusannya untuk maju adalah dipengaruhi oleh ambisi, motivasi, dan kesempatan untuk berdiri. Pada tahapan kedua yaitu seleksi partai *(Being Selected by the Party)*, dipilih oleh partai. Memilih kandidat adalah salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai politik. pertimbangan penting bagi suatu partai adalah menghadirkan seseorang kandidat yang diyakini partai akan memaksimalkan suaranya. Tahapan yang terakhir yaitu basis dukungan *(Getting Elected)*, para orang-orang atau kelompok yang melakukan dukungan

dan menjatuhkan pilihan terhadap calon kandidat juga termasuk penting dalam pertimbangan tahap kandidasi.[22]

Sebagai penguat temuan data awal, peneliti telah membaca dari salah satu karya ilmiah dari Ririn Marselia Hardi yang berjudul "*Self-efficacy* Calon Independen dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Bukittinggi" di dalam karya ilmiah tersebut dikatakan sekretaris DPD partai NasDem Kota Bukittinggi telah membenarkan bahwasanya partai NasDem memakai konsep politik tanpa mahar pada proses kandidasinya. Di Dalam karya ilmiah ini juga terdapat kutipan wawancara dengan Irwandi yang juga ikut menyinggung tentang politik tanpa mahar dikarenakan membebankan terhadap si calon yang ikut serta secara langsung dalam pilkada dan Irwandi juga mengatakan bahwasanya proses rekrutmen yang dilakukan partai sudah cukup gampang namun hanya butuh kepercayaan antara kader partai terhadap calon yang bakal diusung. [23]

Selain itu, peneliti juga telah melakukan wawancara bersama salah satu internal Partai NasDem Kota Bukittinggi yakni Zondrek Dt. Diateh selaku kepala Bidang Keadatan DPC Partai NasDem Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Adapun yang didapat beberapa hal dalam kutipan wawancara berikut ini:

> ".....Partai NasDem memang telah mencanangkan *tagline* politik tanpa mahar sejak lama dengan maksud dan tujuan agar politik tidak selalu dikaitkan dengan uang. Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi Partai NasDem bersama PAN dan PKB menyatukan pikiran dengan mengusung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Irwandi dan David

[22] Jullie Ballington and Azza Karam. 2005. *Op.Cit.*
[23] Ririn Marselia Hardi. 2021. *Self-efficacy Calon Independen dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Bukittinggi*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas. Hlm. 83.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

> Chalik dengan harapan bisa melakukan suatu perubahan agar menjadikan Kota Bukittinggi menjadi kota yang lebih baik kedepannya dan partai memang tidak meminta mahar apapun dari pasangan calon". [24]

Dari sejumlah data awal yang peneliti kumpulkan, peneliti berasumsi bahwa partai politik Partai NasDem menjadi partai politik satu-satunya yang tidak menetapkan mahar kepada calon yang diusung dalam Pilkada 2020 di Kota Bukittinggi dan kandidasi dari Partai NasDem pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi didasari dari tiga aspek yang telah dijelaskan oleh Richard E. Matland yaitu seleksi diri, seleksi partai dan basis dukungan.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Richard E. Matland dan melihat data temuan awal penelitian, Partai NasDem dalam proses kandidasi calon kepala daerah dilihat dari tiga tahapan dalam menentukan calon kandidat yang bakal diusung. Matland menjelaskan adanya tiga tahapan proses kandidasi untuk menentukan siapa calon kandidat yang layak untuk menduduki jabatan sosial-politik maupun jabatan dalam pemerintahan.[25] Dan dari sejumlah data temuan awal penelitian, peneliti berasumsi bahwa Partai NasDem menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia yang menganut gagasan "Politik Tanpa Mahar" dalam proses kandidasi calon kepala daerah.

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan penelitian dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **"Bagaimana proses kandidasi calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai NasDem pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi?".**

---

[24] Wawancara dengan Zondrek selaku Kepala Bidang Keadatan DPC Partai NasDem Guguak Panjang Kota Bukittinggi, di Aur Kuning, Bukittinggi, pada tanggal 23 Desember 2021.
[25] *Ibid.*

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses kandidasi calon kepala daerah dari Partai NasDem pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020? Untuk menganalisis proses kandidasi dengan *tagline*[26] politik tanpa mahar yang digunakan oleh Partai NasDem pada Pilkada 2020.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dalam khasanah Ilmu Politik secara umum dan dapat memberikan gambaran serta penjelasan terkait proses kandidasi calon kepala daerah dari Partai NasDem pada Pilkada dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan referensi atau rujukan terkait data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan wawasan mengenai proses kandidasi partai

[26] *Tagline* merupakan kalimat, tuturan dan perkataan yang mencolok, menarik serta mudah untuk diingat yang berfungsi untuk memberitahu atau menjabarkan tujuan suatu organisasi, ideologi golongan, partai politik dan sebagainya. *Tagline* merupakan tulisan dari sebuah pesan iklan yang merangkum gagasan utama dalam beberapa kata yang mudah diingat. *Tagline* digunakan untuk menyampaikan maksud yang ingin disampaikan oleh si pembuat.
Dikutip dari jurnal Luh Mega Safitri. 2020. Semantik Analisis *Tagline* di Instagram Untuk Mempromosikan Pariwisata Mice (Studi Kasus: Akun Bisnis Phenom Event). *Politeknik Internasional Bali*. 3(1): Hlm 39-56.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

politik dalam kandidasi calon kepala daerah di berbagai daerah khususnya daerah Kota Bukittinggi. Selanjutnya, penerapan kandidasi yang baik melalui penelitian ini diharapkan mampu mencermati secara kritis tentang bagaimana mekanisme proses kandidasi partai politik pada partai NasDem.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA